

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV jejak.
- Alli, Hatta. 2022. *Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Penerbit Alumni.
- Apeldoorn, Van. 1990. *Pengantar ilmu hukum*. Cetakan ke dua puluh empat. Jakarta pradnya paramita.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewantoro. 2023. *Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022)*. Jurnal Hukum Caraka Justitia, Vol.3 No.2.
- Gerhard Mangara Dan Tazqia Aulia Al-Djufri. 2022. *Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3. No.4.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Malang: Bumi Aksara.
- Hakim, Rohman. 2023. *Diskrepansi asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara Gugatan perdata di peradilan umum*. Journal Evidence Of Law, Vol. 2 No. 1.
- L.J, Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. *“Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”*. Jurnal Crepido, Vol.1 No.1.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Meyrina, Rr. Susana Andi. 2017. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan*. Jurnal HAM Vol. 8 No. 1.
- M. Usrin. *Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Palembang.

- Nababan, Herlinca dkk. 2024. *Analisis Terhadap Panggilan Sidang Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*. Jurnal ilmu hukum, humaniora dan politik (JIHHP), Vol. 4 No. 4.
- Prayogo, R. Tony. 2016. “*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13 No.2.
- Rasyid, Laila M. dkk. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press.
- Santoso, Raihan Andhika dkk. 2023. *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia*. DEPOSISI:Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol. 1 No.4.
- Wahidmurni. 2017. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Wantu, Fence m. 2007. “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*”. Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3.
- Sunarto. 2019. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada media Group.
- Yusuf, A.Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Agung RI, ” Tingkatkan Pelayanan Peradilan Sederhana, Ma Keluarkan Terobosan Baru,” dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5823/tingkatkan-pelayanan-peradilan-sederhana-ma-keluarkan-terobosan-baru> (diakses pada tanggal 9 oktober 2024).
- <http://www.pn-tulungagung.go.id/profil-pengadilan/artikel/informasi/profil-pengadilan-negeri-tulungagung> diakses pada 02 Maret 2025, pukul 22.33 WIB.
- <http://pn-tulungagung.go.id/sejarah-pengadilan/utama/tentang-pengadilan> diakses pada 02 Maret 2025, pukul 22.33 WIB.
- <http://www.pn-tulungagung.go.id/struktur-organisasi/artikel/informasi/struktur-organisasi> diakses pada 02 Maret 2025, pukul 22.33 WIB.
- <http://www.pn-tulungagung.go.id/struktur-organisasi/artikel/informasi/struktur-organisasi> diakses pada 02 Maret 2025, pukul 22.33 WIB.

Perundang-Undangan :

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG no 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Jurusita.

HIR (Herziene Indonesich Reglement) dan RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten).